

Laporan ini disampaikan bersamaan dengan laporan tahunan

# **LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA DAN LAPORAN TAHUNAN 2025**

**PT BPR Daya Arta**

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

## PT Bank Perekonomian Rakyat Daya Arta

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

1039164-1-LTBPRK-R-A-20251231-010201-600012-11052026135434

Periode Data

2025

User ID Petugas Pelaporan

ptbprdayaarta@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-05-11 13:54:34



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

**A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA**

Alamat	Jalan Arteri Mangga Dua Raya (Komplek Ruko Bahan Bangunan Blok F2 Nomor 29) Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah besar, Jakarta Pusat – 10730
Nomor Telepon	021-6018030
Penjelasan Umum	<p>Dalam rangka meningkatkan kinerja PT BPR Daya Arta, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku serta nilai nilai etika yang berlaku pada industri Perbankan, maka PT BPR Daya Arta wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan menerapkan Tata Kelola yang baik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat.</p> <p>Penerapan Tata Kelola merupakan faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap PT BPR Daya Arta. Hal ini dilakukan terus menerus dalam upaya meningkatkan implementasi prinsip prinsip Tata Kelola yang baik.</p> <p>Pelaksanaan Kegiatan Usaha PT BPR Daya Arta berpedoman pada Prinsip Tata Kelola yang meliputi 5 (lima) pilar yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transparansi (Transparency), adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.</li> <li>2. Akuntabilitas (Accountability), adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.</li> <li>3. Pertanggungjawaban (Responsibility), adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan prinsip prinsip pengelolaan bank yang sehat.</li> <li>4. Independensi (Independency), adalah pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.</li> <li>5. Kewajaran (Fairness), adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang undangan yang berlaku.</li> </ol> <p>PT BPR Daya Arta wajib menyusun laporan transparansi pelaksanaan tata kelola pada setiap akhir tahun buku dan dalam upaya perbaikan serta peningkatan kualitas penerapan Tata Kelola, BPR juga melakukan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan tata kelola, sehingga apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapannya, PT BPR Daya Arta dapat segera menetapkan rencana tindak dan melaksanakan langkah perbaikan yang diperlukan.</p>

Peringkat Hasil Sendiri (Self Assessment) Komposit Penilaian (Self Assessment) Tata Kelola	2 (Baik)
Penjelasan Komposit Penilaian (Self Assessment) Tata Kelola	Merujuk pada analisis sebagaimana diungkapkan pada kertas kerja <i>self assessment</i> Penerapan Tata Kelola PT BPR Daya Arta tahun 2025 secara umum adalah baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan-kelemahan yang didapati akan menjadi perhatian BPR dan akan diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen BPR dan BPR akan terus melakukan perbaikan terhadap beberapa kelemahan yang ada untuk penyempurnaan pelaksanaan penerapan Tata Kelola, serta melakukan pemenuhan terhadap komitmen BPR kepada Regulator.

## B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	<p>NIK : -</p> <p>Nama : Hendri Chandra</p> <p>Jabatan : Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR;</li> <li>b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan;</li> <li>c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi;</li> <li>d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;</li> <li>e. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai;</li> <li>f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</li> <li>g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;</li> <li>h. Menyediakan data, informasi yang akurat, relevan, tepat waktu kepada Dewan Komisaris;</li> <li>i. Memastikan dan meningkatkan tata-tertib dan disiplin kerja;</li> </ul>

		j. Menetapkan langkah - langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh POJK dan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian serta memantau, menjaga kepatuhan BPR agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
2.	NIK	: -
	Nama	: Ho Christine
	Jabatan	: Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab	: a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR; b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan; c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; e. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai; f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan; g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai; h. Menyediakan data, informasi yang akurat, relevan, tepat waktu kepada Dewan Komisaris; i. Memastikan dan meningkatkan tata-tertib dan disiplin kerja; j. Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko.
Tindak Lanjut Rekomendasi : Sebagian Besar Rekomendasi Direksi telah ditindaklanjuti		

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	NIK	: -
	Nama	: Susilo Goetomo
	Jabatan	: Komisaris Utama

	<p>Tugas dan Tanggung Jawab : a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;</p> <p>b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;</p> <p>c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;</p> <p>d. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang:</p> <p>1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau</p> <p>2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;</p> <p>e. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan agenda rapat Dewan Komisaris;</p> <p>f. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.</p>
2.	<p>NIK : -</p>
	<p>Nama : Syarifuddin</p>
	<p>Jabatan : Komisaris</p>
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab : a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;</p> <p>b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;</p> <p>c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;</p> <p>d. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang:</p> <p>1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau</p> <p>2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;</p> <p>e. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan agenda rapat Dewan Komisaris;</p> <p>f. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.</p>
<p>Rekomendasi kepada Direksi: Sebagian Besar Rekomendasi Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti</p>	

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

#### a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan : - Tanggung Jawab
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan : - Tanggung Jawab
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan : - Tanggung Jawab
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
4.	Komite Manajemen Risiko
	Tugas dan : - Tanggung Jawab
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
5.	Komite Lainnya
	Tugas dan : - Tanggung Jawab
	Program Kerja : -

Realisasi	: -
Jumlah Rapat	: -
PT BPR Daya Arta belum wajib membentuk komite dikarenakan jumlah modal inti saat ini masih dibawah Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah)	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Independen Ya/Tdk
				Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunersi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko	Komite Lainnya	
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT BPR Daya Arta belum termasuk kriteria dalam pembentukan komite sesuai POJK Tata Kelola dan Manajemen Risiko.									

**4. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA KELOMPOK USAHA BPR**

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	-	Hendri Chandra	PT BPR Daya Arta	00.00	00.00
2	-	Ho Christine	PT BPR Daya Arta	00.00	00.00

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	-	Susilo Goetomo	PT BPR Daya Arta	53.50	53.50
2	-	Syarifuddin	PT BPR Daya Arta	00.00	00.00

3. Kepemilikan Saham Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	-	Susilo Goetomo	PT BPR Daya Arta	53.50	53.50
2	-	Irawan Tjahjadi	PT BPR Daya Arta	23.25	23.25
3	-	Mutia Djuwita Widjajamukti	PT BPR Daya Arta	23.25	23.25

PT BPR Daya Arta telah melakukan penambahan modal disetor yang telah dituangkan pada Akta BPR No. 45 Tanggal 24 Januari 2025 dan telah mendapatkan bukti penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari kementerian hukum republik indonesia, namun baru ditatausahakan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. S-16/KO.111/2026 tertanggal 21 Januari 2026.

5. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	-	Hendri Chandra	-	-	00.00
2	-	Ho Christine	-	PT Sinar Berkat Abadi Jayasakti	51.00

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	-	Susilo Goetomo	-	PT Samudra Reksa Mulia	12.50
2	-	Susilo Goetomo	-	PT Delta Kirana Utama	22.85
3	-	Susilo Goetomo	-	PT Graha Sapta Karya	04.00
4	-	Syarifuddin	-	-	00.00

Terdapat kepemilikan saham salah satu Anggota Dewan Komisaris dan salah satu Anggota Direksi pada Perusahaan lain.

6. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham

1	-	Hendri Chandra	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	-	Ho Christine	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	-	Susilo Goetomo	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	-	Syarifuddin	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

3. Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	-	Susilo Goetomo	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	-	Irawan Tjahjadi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	-	Mutia Djuwita Widjajamukti	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Pada PT BPR Daya Arta, tidak terdapat hubungan keuangan di antara Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, maupun pemegang saham. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pihak menjalankan perannya secara independen tanpa adanya keterkaitan finansial yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan. Kondisi tersebut mencerminkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, khususnya dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan menghindari potensi benturan kepentingan.

**7. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR**

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	-	Hendri Chandra	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	-	Ho Christine	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham

1	-	Susilo Goetomo	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	-	Syarifuddin	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

3. Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	-	Susilo Goetomo	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	-	Irawan Tjahjadi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	-	Mutia Djuwita Widjajamukti	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Pada PT BPR Daya Arta, tidak terdapat hubungan keluarga di antara Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, maupun pemegang saham. Kondisi ini mencerminkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, khususnya dalam menjaga independensi, objektivitas, serta menghindari potensi benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan.

**8. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS**

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	456.000.000	2	312.600.000
2.	Tunjangan	2	158.586.120	2	78.497.160
3.	Tantiem	0		0	0
4.	Kompensasi berbasis saham	0		0	0
5.	Remunersi lainnya	0		0	0
	<b>Total Remunerasi</b>		<b>614.586.120</b>		<b>391.097.160</b>
	<b>Jenis Fasilitas Lain</b>				
1.	Perumahan	0	0	0	0
2.	Transportasi	0	0	0	0
3.	Asuransi Kesehatan	0	0	0	0
4.	Fasilitas Lainnya	0	0	0	0
	<b>Total Fasilitas Lainnya</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Total Remunerasi dan Fasilitas Lain</b>		<b>614.586.120</b>		<b>391.097.160</b>

Jumlah Orang dan/atau Jumlah Keseluruhan (Rp) merupakan nilai Realisasi Tahun 2025 dengan tetap berdasarkan keputusan RUPS.

**9. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH**

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan
	a/b
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.56
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.53
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.88

Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.35
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.26

Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

#### 10. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	20250227	8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR Tahun 2024;</li> <li>2. Hasil Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2024;</li> <li>3. Rencana Tindak Penyelesaian Kredit Bermasalah (NPL);</li> <li>4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Umum OJK Tahun 2024.</li> </ol>
2.	20250612	7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR s/d 31 Mei 2025;</li> <li>2. Pencegahan Judi Online dan APU PPT PPPSPM;</li> <li>3. Penyelesaian Kredit Bermasalah;</li> <li>4. Permodalan.</li> </ol>
3.	20250911	6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR s/d 31 Agustus 2025;</li> <li>2. Penyelesaian Kredit Bermasalah;</li> <li>3. Pelindungan Konsumen.</li> </ol>
4.	20251216	7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan dan Penetapan Rencana Bisnis Bank Tahun 2026;</li> <li>2. Penetapan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2026;</li> <li>3. Pemanfaatan Data Dukcapil.</li> </ol>

Berdasarkan Point Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR/BPRS dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR. maka Direksi dan Dewan Komisaris PT BPR Daya Arta telah melaksanakan Rapat sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

### 11. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	-	Susilo Goetomo	4	0	100.00
2.	-	Syarifuddin	4	0	100.00

Dewan Komisaris PT BPR Daya Arta menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 3 (tiga) bulan, dengan kehadiran seluruh anggota Dewan Komisaris.

### 12. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (dalam 1 tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Peyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Pada tahun 2025 PT BPR Daya Arta tidak terdapat/tidak menemukan adanya penyimpangan Internal (Internal Fraud)

### 13. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Terdapat permasalahan hukum atas gugatan perdata dari beberapa debitur BPR dan sindikasi, yang mana gugatan tersebut telah dinyatakan gugur dan tertuang pada keputusan pengadilan negeri dan lainnya juga terdapat gugatan kembali dari debitur serta terdapat beberapa debitur yang masih dalam proses kepolisian.

### 14. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Penerima Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
1	-	Hendri Chandra	Direktur Utama	-	-	-	-	-	-
2	-	Ho Christine	Direktur	-	-	-	-	-	-
3	-	Susilo Goetomo	Komisaris Utama	-	-	-	-	-	-
4	-	Syarifuddin	Komisaris	-	-	-	-	-	-

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

### 15. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah (Rp)
1	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	

Pada tahun 2025 PT BPR Daya Arta Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik.



# PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAYA ARTA

Komplek Ruko Bahan Bangunan Blok F2 Nov. 29  
Jl. Arteri Mangga Dua Raya, Jakarta 10730  
Telp. 6018030 - 6018031 Fax. 6126730

---

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA**  
**DAN LAPORAN TAHUNAN**  
**PT BPR DAYA ARTA**  
PERIODE TAHUN 2025

Telah disahkan dan disetujui di Jakarta, tanggal 27 April 2026.

Tertanda,  
PT BPR Daya Arta

  
  


**Hendri Chandra**  
Direktur Utama

**Susilo Goetomo**  
Komisaris Utama



Nomor : 1.12.044/BSN/IV/2026  
Lampiran : Lampiran I - IV  
Perihal : *Management Letter*

Kepada Yth.,  
**Pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan  
PT Bank Perekonomian Rakyat Daya Arta**  
di Bekasi

Kami telah melakukan Audit atas Laporan Keuangan PT BPR Daya Arta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 serta telah mengeluarkan Laporan Auditor Independen No. 00050/2.0452/AU.8/07/0630-1/1/IV/2026 tanggal 27 April 2026 dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian.

Sebagai bagian dari Audit tersebut, yang diharuskan dalam Standar Profesional Akuntan Publik. Tujuannya adalah kami telah melakukan studi dan evaluasi terhadap pengendalian intern Perusahaan, seperti untuk menentukan sifat dan luasnya ruang lingkup pemeriksaan serta jenis audit prosedur yang harus dilakukan.

Evaluasi terhadap pengendalian intern Perusahaan ini, bukanlah merupakan suatu audit khusus terhadap pengendalian intern Perusahaan, dan laporan yang kami buat ini merupakan suatu laporan tambahan dari laporan audit kami.

Keadaan administrasi serta pengendalian intern Perusahaan secara umum cukup baik, akan tetapi selama Audit berlangsung kami menemukan beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen untuk perbaikan selanjutnya.

*Management Letter* ini ditujukan hanya untuk memberikan informasi kepada manajemen Perusahaan dan bukan untuk disajikan pada pihak-pihak luar Perusahaan, untuk mencegah kemungkinan timbulnya salah pengertian dari pihak-pihak yang kurang memahami mengenai tujuan dan keterbatasan dari suatu pengendalian intern dan evaluasi serta tes yang kami lakukan atas pengendalian intern tersebut.

Seandainya ada hal-hal yang kurang jelas atau memerlukan penjelasan lebih lanjut, kami bersedia untuk mendiskusikan hal tersebut. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada manajemen dan seluruh staf Perusahaan yang telah memberikan bantuan dan kerjasama yang baik selama pelaksanaan audit.

Adapun hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian manajemen terlampir.

Bekasi, 27 April 2026

**Kantor Akuntan Publik  
Bambang Sutjipto Ngumar & Rekan**



**(Drs. Bambang Herwanto, Ak., M.M., CA., CPA., CFI)**  
*Managing Partner*



Lampiran I

KONDISI KEUANGAN per 31 Desember 2025

Berikut ikhtisar posisi keuangan dan kinerja Bank per 31 Desember 2025:

Indikator Keuangan	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Perubahan
Total Aset	112.059.630.340	126.874.475.812	-11,7%
Total Kredit yang Diberikan (Neto)	74.293.614.505	80.565.317.936	-7,8%
Total Simpanan Nasabah	103.232.618.608	118.896.513.154	-13,2%
Total Ekuitas	7.241.581.129	7.441.654.923	-2,7%
Pendapatan Bunga Bersih	1.348.820.549	1.774.150.520	-24,0%
Rugi Bersih Tahun Berjalan	(200.073.793)	(953.183.706)	Membaik 79%
Akumulasi Saldo Rugi	(5.258.418.871)	(5.058.345.077)	-3,9%
NPL Gross	~29,2%	~23,2%	Meningkat

I. KELANGSUNGAN USAHA (GOING CONCERN)

Temuan:

1. Bank telah mengalami **kerugian bersih selama tiga tahun berturut-turut**, dengan rugi bersih Rp953,2 juta (2024) dan Rp200,1 juta (2025), sehingga akumulasi saldo rugi per 31 Desember 2025 mencapai **Rp5.258.418.871**
2. Rasio NPL Gross berada pada **29,2%**, jauh melampaui batas maksimum OJK sebesar 5%.
3. Kas bersih dari aktivitas operasi hanya **Rp9.191.500** sepanjang tahun 2025 - mencerminkan perusahaan mampu menghasilkan kas dari aktivitas operasional utamanya selama periode berjalan.
4. Simpanan nasabah turun signifikan **Rp15,7 miliar (-13,2%)**, dibanding periode sebelumnya, yang menunjukkan berkurangnya dana pihak ketiga akibat penarikan dana oleh nasabah.



## Lampiran II

### Rekomendasi:

Manajemen direkomendasikan untuk:

1. Segera implementasikan rencana bisnis pemulihan (**Recovery Plan**) secara tertulis dan terukur yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada OJK.
2. Optimalkan **dana setoran modal Rp930 juta** yang telah mendapat persetujuan OJK (Surat No. S-33/KO.111/2026 tanggal 6 Februari 2026) untuk memperkuat permodalan dan likuiditas operasional.
3. Pertimbangkan penambahan modal inti secara signifikan atau mencari **investor strategis** guna memperkuat fondasi permodalan jangka menengah
4. Susun proyeksi arus kas bulanan setidaknya 12 bulan ke depan sebagai alat pemantauan risiko likuiditas.

## II. KREDIT BERMASALAH (NPL) DAN KUALITAS ASET

### Temuan:

1. Kredit non-lancar (kurang lancar + diragukan + macet) mencapai **Rp22,4 miliar atau 29,2% dari total kredit**, jauh di atas batas sehat 5%.
2. Kredit macet senilai **Rp13,7 miliar** merupakan komponen terbesar NPL.
3. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) naik dari Rp5,99 miliar menjadi **Rp6,27 miliar**, di mana sebesar **Rp5,99 miliar dimiliki lebih dari 1 tahun**. Berdasarkan POJK No. 1/2024, AYDA ini berpotensi menjadi **faktor pengurang modal inti** dalam perhitungan KPMM.
4. Bunga dalam penyelesaian per *off-balance sheet* mencapai **Rp9,63 miliar**, yang bila dapat dipulihkan akan berdampak signifikan terhadap laba.

### Rekomendasi:

1. Bentuk **satuan tugas penagihan khusus** untuk kredit non-lancar, dengan target *recovery* bulanan yang terukur dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris
2. Susun **rencana penyelesaian AYDA** secara tertulis per debitur, mengingat POJK No. 1/2024 membatasi kepemilikan AYDA dan mewajibkan penjualan secepatnya. Segera tunjuk penilai independen untuk AYDA bernilai di atas Rp500 juta.
3. Terapkan **restrukturisasi kredit** secara selektif bagi debitur dengan prospek pemulihan yang terindikasi, disertai analisis kemampuan bayar yang memadai.
4. Perkuat prosedur **analisis kredit dan prinsip kehati-hatian** termasuk verifikasi lapangan sebelum pencairan, serta terapkan sistem peringatan dini (*early warning system*) untuk kredit yang menunjukkan tanda-tanda memburuk.



### Lampiran III

#### III. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA

Temuan:

Bank **belum melakukan perhitungan aktuarial** atas kewajiban imbalan pasca kerja karyawan sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 13/2003 jo. PP No. 35/2021 dan SAK EP paragraf 28. Akibatnya, liabilitas imbalan pasca kerja **tidak diakui** dalam laporan posisi keuangan dan beban terkait tidak dicatat dalam laporan laba rugi. Jumlah kewajiban yang tidak diakui ini tidak dapat ditentukan tanpa perhitungan aktuarial.

Rekomendasi:

- i. Segera tunjuk **aktuaris independen** yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan untuk menghitung kewajiban imbalan pasca kerja per 31 Desember 2025.
- ii. Catat kewajiban imbalan pasca kerja secara retrospektif mulai laporan keuangan tahun berikutnya dan **ungkapkan dampaknya** dalam catatan laporan keuangan sesuai SAK EP.
- iii. Perhatikan bahwa keikutsertaan karyawan dalam **BPJS Ketenagakerjaan** tidak menggantikan kewajiban manfaat pasca kerja berdasarkan UU Ketenagakerjaan

#### IV. LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN

Temuan:

Pada tahun 2025, Bank untuk pertama kali mengakui liabilitas pajak tangguhan sebesar **Rp127.894.706** sehubungan dengan penerapan SAK EP, yang berasal dari perbedaan temporer atas CKPN kredit sebesar Rp581.339.573 (tarif 22%). Pengakuan ini menambah beban dan mengurangi laba bersih Bank.

Di sisi lain, Bank **tidak mengakui aset pajak tangguhan** atas akumulasi kerugian fiskal sebesar Rp5.297.929.843 karena tidak ada kepastian yang memadai bahwa laba kena pajak di masa depan tersedia untuk mengkompensasi kerugian tersebut.

Rekomendasi:

- a. Dokumentasikan dan review secara berkala **beda temporer** antara pembukuan komersial dan fiskal sebagai dasar perhitungan pajak tangguhan setiap akhir tahun.
- b. Jika kondisi keuangan membaik, evaluasi kembali kemungkinan **pengakuan aset pajak tangguhan** atas akumulasi rugi fiskal sesuai SAK EP.



#### Lampiran IV

#### V. DANA SETORAN MODAL

Temuan:

Dana setoran modal sebesar **Rp930.000.000** dari Tn. Susilo Goetomo (Komisaris Utama) yang ditempatkan dalam deposito escrow **belum dicatat sebagai modal disetor** karena masih menunggu persetujuan OJK. Dana tersebut diklasifikasikan sebagai liabilitas (**Dana Setoran Modal**). Persetujuan OJK diterima pada 21 Januari 2026 (S-16/KO.111/2026) dan pencairan deposito escrow disetujui pada 6 Februari 2026 (S-33/KO.111/2026)..

Rekomendasi:

Manajemen direkomendasikan untuk:

- a. Setelah persetujuan OJK diterima, **reklasifikasikan Dana Setoran Modal** dari liabilitas menjadi bagian dari ekuitas (tambahan modal disetor) dan lakukan pembaruan administrasi kepemilikan saham sesuai ketentuan.
- b. Perbarui **komposisi kepemilikan saham** sesuai dengan akta terbaru dan catatan OJK (modal menjadi Rp12.500.000.000 dengan 1.250 lembar saham) dalam catatan laporan keuangan berikutnya.

#### VI. PENGENDALIAN INTERNAL DAN TATA KELOLA

Temuan:

1. Beban tenaga kerja menurun dari Rp2,113 miliar menjadi **Rp2,022 miliar** (turun Rp90 juta), namun komponen **uang makan** menurun drastis dari Rp233 juta menjadi Rp18 juta, yang menunjukkan adanya efisiensi biaya pegawai atau berkurangnya kebutuhan tenaga kerja pada periode berjalan.
2. Kredit kepada **pihak terkait** meningkat dari Rp351 juta menjadi **Rp1,83 miliar**, termasuk kepada Komisaris dan Direksi. Pengawasan atas BMPK pihak terkait perlu diperketat.
3. Bank memiliki 13 karyawan (termasuk 2 Komisaris dan 2 Direksi), sehingga **segregasi tugas** sangat terbatas dan meningkatkan risiko kecurangan

Rekomendasi:

1. Terapkan **kebijakan tertulis** terkait kompensasi karyawan termasuk uang makan, tunjangan, dan insentif, serta pastikan konsistensi penerapannya setiap tahun.
2. Perketat pemantauan **Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)** kepada pihak terkait sesuai POJK yang berlaku dan laporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris.
3. Perkuat fungsi **audit internal** meskipun dalam kondisi SDM terbatas, dengan memanfaatkan mekanisme pengawasan Komisaris secara aktif dan mempertimbangkan penggunaan jasa audit internal eksternal.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT**  
**DAYA ARTA**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025

# DAFTAR ISI

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>SURAT PERNYATAAN DIREKSI</b>	
<b>LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN</b>	
<b>LAPORAN KEUANGAN</b>	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi	2
Laporan Perubahan Ekuitas	3
Laporan Arus Kas	4
<b>CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b>	<b>5</b>

# SURAT PERNYATAAN DIREKSI



# PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAYA ARTA

KOMPLEK RUKO BAHAN BANGUNAN BLOK F2 NO. 29

Jl. Arteri Mangga Dua Raya, Jakarta 10730

Telp. 6018030 – 6018031 Fax. 6126730

---

**PT BPR DAYA ARTA**  
**SURAT PERNYATAAN DIREKSI**  
**TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

---

No. : 112/DIR/DA/IV/2026

Saya yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Hendri Chandra  
Alamat Kantor : JL. Arteri Mangga Dua Raya Komplek Ruko Bahan Bangunan  
Blok F2 No.29 Kel Mangga Dua Selatan Kec Sawah Besar,  
Jakarta Pusat  
Alamat Rumah Sesuai KTP : JL. Budi Mulia / 10 A RT.008 RW.005 Kel Pademangan Barat,  
Kec. Pademangan, Jakarta Utara  
Nomor Telepon : 021-6018030  
Jabatan : Direktur Utama

Menyatakan Bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT BPR Daya Arta
2. Laporan keuangan PT BPR Daya Arta telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat;
3. a. Semua Informasi dalam laporan keuangan PT BPR Daya Arta telah dimuat secara lengkap dan benar;  
b. Laporan keuangan PT BPR Daya Arta tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT BPR Daya Arta

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 27 April 2026



**Hendri Chandra**  
Direktur Utama

---

# LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



Nomor: 00050/2.0452/AU.8/07/0630-1/1/IV/2026

## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi  
**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT  
DAYA ARTA**

### Opini Kualifikasian

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Daya Arta ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Kualifikasian, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP).

### Basis untuk Opini Kualifikasian

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 32 atas laporan keuangan Perusahaan tidak mengakui liabilitas imbalan pasca kerja karyawan dalam laporan posisi keuangan per 31 Desember 2025 dan tidak mengakui beban imbalan pasca kerja dalam laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan SAK EP Paragraf 28 yang mewajibkan entitas untuk mengakui kewajiban imbalan pasca kerja sebagai kewajiban imbalan pasti pada tanggal pelaporan, yang meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya. Karena Perusahaan tidak melakukan perhitungan atau penyusunan estimasi atas kewajiban dimaksud sehingga kami tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat atas jumlah liabilitas dan beban imbalan pasca kerja yang seharusnya diakui.

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan sesuai dengan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, sebagaimana berlaku untuk audit atas laporan keuangan entitas dengan akuntabilitas publik di Indonesia. Kami juga telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.



### **Penekanan Suatu Hal**

Tanpa memodifikasi opini kami, kami mengarahkan perhatian pembaca pada Catatan 34 atas laporan keuangan yang mengungkapkan bahwa Perusahaan mengalami kerugian usaha selama tiga tahun berturut-turut dengan akumulasi saldo rugi sebesar Rp5.258.418.871, penurunan pendapatan bunga bersih sebesar 24,0%, penurunan simpanan nasabah sebesar Rp15.663.894.546 atau 13,2%, rasio kredit bermasalah sebesar 29,2% yang melampaui batas ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta kas bersih dari aktivitas operasi yang hanya sebesar Rp9.191.500. Kondisi-kondisi tersebut mengindikasikan adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

### **Hal Lain**

Laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 07 Maret 2025.

### **Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP), dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata Kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

### **Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.



### Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik  
Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan

Drs. Bambang Herwanto, Ak., M.M., CA., CPA, CFI

No Izin Akuntan Publik No. AP.0630

Bekasi, 27 April 2026



# LAPORAN KEUANGAN

# PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAYA ARTA

## LAPORAN POSISI KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan bank	2b, 3	36.737.000	30.628.700
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	2c, 4	382.952.756	533.295.888
Penempatan Pada Bank Lain	2d, 5	26.204.778.255	35.261.632.510
Kredit Yang Diberikan	2e, 6	74.293.614.505	80.565.317.936
Agunan Yang Diambil Alih	2h, 7	6.274.206.872	5.993.246.171
Aset Lain-lain	2k, 8	889.605.299	430.879.772
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>108.081.894.687</b>	<b>122.815.000.977</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Aset tetap	2i, 9		
Setelah dikurangi akumulasi penyusutan tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.410.140.505,- dan Rp1.332.461.871,-.		3.977.735.647	4.052.331.081
Aset Tidak Berwujud			
Setelah dikurangi akumulasi amortisasi tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp254.130.684,- dan Rp246.986.936,-.	2j, 10		
		6	7.143.754
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<b>3.977.735.653</b>	<b>4.059.474.835</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>112.059.630.340</b>	<b>126.874.475.812</b>
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
Kewajiban segera	2l, 11	165.510.804	128.494.106
Utang Bunga	2m, 12	291.459.461	387.244.755
Utang Pajak	2n, 13	-	82.368
Simpanan	2o, 14	103.232.618.608	118.896.513.154
Dana Setoran Modal	15	930.000.000	-
Kewajiban lain-lain	16	70.565.632	20.486.506
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>104.690.154.505</b>	<b>119.432.820.889</b>
<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>			
Liabilitas Pajak tangguhan	26 b	127.894.706	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>		<b>127.894.706</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>104.818.049.211</b>	<b>119.432.820.889</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham	17		
Modal dasar 2.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000.000,- per lembar saham. Saham ditempatkan 1.157 lembar saham.		11.570.000.000	11.570.000.000
Tambahan modal disetor	18	930.000.000	930.000.000
Saldo laba	19	(5.258.418.871)	(5.058.345.077)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>7.241.581.129</b>	<b>7.441.654.923</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>112.059.630.340</b>	<b>126.874.475.812</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAYA ARTA**  
**LAPORAN LABA RUGI**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Pendapatan Bunga	2w, 20	8.998.592.149	10.650.006.940
Beban Bunga	2w, 21	(7.649.771.600)	(8.875.856.420)
<b>Jumlah Pendapatan Bunga Bersih</b>		<b>1.348.820.549</b>	<b>1.774.150.520</b>
Pendapatan Operasional Lainnya	2w, 22	1.095.200.401	284.189.075
<b>Jumlah Pendapatan Operasional</b>		<b>2.444.020.949</b>	<b>2.058.339.595</b>
Beban Pemasaran	2w, 23	-	(4.049.280)
Beban Umum & Administrasi	2w, 24	(2.422.725.049)	(2.846.775.403)
Beban Operasional Lainnya	2w, 25	(88.414.866)	(75.400.158)
<b>Laba Operasional</b>		<b>(2.511.139.915)</b>	<b>(2.926.224.841)</b>
Beban Non Operasional	2w,26	(5.060.122)	(85.298.460)
<b>RUGI SEBELUM PAJAK</b>		<b>(72.179.087)</b>	<b>(953.183.706)</b>
<b>(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN</b>			
Beban Pajak Penghasilan - Kini	2y, 27	-	-
Beban Pajak Penghasilan - Tangguhan		(127.894.706)	-
<b>JUMLAH RUGI TAHUN BERJALAN</b>		<b>(200.073.793)</b>	<b>(953.183.706)</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAYA ARTA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**  
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<b>Modal Disetor</b>	<b>Tambahan Modal</b>	<b>Saldo Laba (Rugi)</b>	<b>Jumlah Ekuitas</b>
<b>Saldo 1 Januari 2024</b>	<b>11.570.000.000</b>	-	<b>(4.105.161.371)</b>	<b>7.464.838.629</b>
Penambahan modal	-	930.000.000	-	930.000.000
Rugi tahun berjalan	-	-	(953.183.706)	(953.183.706)
<b>Saldo 31 Desember 2024</b>	<b>11.570.000.000</b>	<b>930.000.000</b>	<b>(5.058.345.077)</b>	<b>7.441.654.923</b>
Rugi tahun berjalan	-	-	(200.073.793)	(200.073.793)
<b>Saldo 31 Desember 2025</b>	<b>11.570.000.000</b>	<b>930.000.000</b>	<b>(5.258.418.871)</b>	<b>7.241.581.129</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAYA ARTA**  
**LAPORAN ARUS KAS**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI</b>		
Rugi bersih	(200.073.793)	(953.183.706)
Rekonsiliasi laba bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi:		
CKPN penempatan pada bank lain	(25.890.465)	(23.414.954)
CKPN aset produktif	(581.339.573)	(2.343.578.117)
Penyusutan aset tetap dan inventaris	77.678.634	98.797.179
Amortisasi aset tidak berwujud	7.143.748	9.525.000
<b>Kas sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi</b>	<b>(722.481.449)</b>	<b>(3.211.854.598)</b>
<b>Penurunan (Kenaikan) :</b>		
Pendapatan bunga yang akan diterima	150.343.132	(44.004.258)
Penempatan pada bank lain	9.082.744.720	(1.302.776.789)
Kredit yang diberikan	6.853.043.004	9.369.884.933
Agunan yang diambil alih	(280.960.701)	(202.993.268)
Aset lain-lain	(458.725.528)	30.336.022
Kewajiban segera	37.016.698	(12.749.617)
Utang bunga	(95.785.294)	(673.909.678)
Utang pajak	(82.368)	-
Simpanan	(15.663.894.546)	3.547.142.038
Simpanan dari bank lain	-	(4.420.581.318)
Dana Setoran Modal	930.000.000	-
Kewajiban imbalan kerja	-	-
Kewajiban lain-lain	50.079.126	(6.386.667)
Liabilitas pajak tangguhan	127.894.706	-
<b>Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi</b>	<b>9.191.501</b>	<b>3.072.106.800</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Perolehan Aset tetap	(3.083.200)	(4.019.000.000)
Aset tidak berwujud	-	-
<b>Kas Bersih (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi</b>	<b>(3.083.200)</b>	<b>(4.019.000.000)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Modal disetor	-	930.000.000
<b>Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>-</b>	<b>930.000.000</b>
<b>KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>6.108.300</b>	<b>(16.893.200)</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<b>30.628.700</b>	<b>47.521.900</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>36.737.000</b>	<b>30.628.700</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

# PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAYA ARTA

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

#### 1. GAMBARAN UMUM

##### a. Informasi Umum Perusahaan

PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Daya Arta (selanjutnya disebut Bank) didirikan berdasarkan Akta Nomor 21 tanggal 31 Desember 1969 yang dibuat di hadapan Notaris A. Sitompul, SH., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Department Kehakiman Nomor Y.A.5/114/9 tanggal 19 Februari 1976.

Perubahan nama dari PT Bank Perkreditan Rakyat Daya Arta menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Daya Arta terdapat pada Akta nomor 05 tanggal 03 Desember 2024. Akta ini telah dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0283347 tanggal 04 Desember 2024.

Kantor Pusat Bank berlokasi di Komplek Ruko Bahan Bangunan Blok F2 No. 29, Jl. Arteri Mangga Dua Raya, Jakarta 10830.

##### b. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan tujuan pendiriannya, PT Bank Perekonomian Daya Arta melakukan aktivitas utama sebagai Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yaitu kegiatan usaha bank secara konvensional, meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

##### c. Legalitas

Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.301.272.9-033.000  
Nomor Induk Berusaha : 12005000472817

##### d. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Nomor: 5 tanggal 03 Desember 2024 oleh Notaris Adianto Sinaga. SH., M.Kn., susunan pengurus Bank per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

###### Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Tn. Susilo Goetomo  
Komisaris : Tn. Syarifuddin

###### Direksi

Direktur Utama : Tn. Hendri Chandra  
Direktur : Ny. Ho Christine

Pada saat pemeriksaan per 31 Desember 2025, jumlah karyawan perseroan adalah sebanyak 13 orang termasuk 2 (dua) orang Komisaris dan 2 (dua) orang Direksi.

##### e. Manajemen Risiko

PT BPR Daya Arta mencoba melakukan penerapan sistem manajemen risiko yang mencakup risiko kredit, risiko operasional dan risiko kepatuhan yang ditempuh dengan cara :

- Pengelolaan kredit antisipasi dilakukan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dengan mencoba melakukan analisa secara lebih mendalam serta tahapan keputusan kredit sesuai dengan kewenangan dan penerapan tabungan buku sebesar satu kali angsuran pada setiap pencairan baru maupun perpanjangan.

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAYA ARTA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**  
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**1. GAMBARAN UMUM (LANJUTAN)**

**e. Manajemen Risiko (Lanjutan)**

- b. Pengelolaan risiko operasional dilakukan dengan penyempurnaan prosedur kerja, memberikan fasilitas kepada para pegawai untuk melanjutkan tingkat pendidikan, melakukan penyempurnaan terhadap program komputerisasi penunjang operasional guna mengurangi kesalahan dalam pencatatan serta peningkatan sarana dan prasarana kerja yang telah representatif.
- c. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan dengan cara memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan manajemen sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain, termasuk yang berkaitan dengan aspek hukum.

**2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan, yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat:

**a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan ini disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan pengungkapan yang disyaratkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) berdasarkan prinsip kesinambungan (*Going Concern*) serta mengikuti konvensi harga historis (*Historical Cost*).

Laporan keuangan Bank Perekonomian Rakyat disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) merupakan adopsi dari IFRS for SMEs yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, serta Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA BPR) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/SEOJK.03/2024 tanggal 24 Desember 2024.

Laporan keuangan PT BPR Daya Arta terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, Laporan Komitmen dan Kontijensi, Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Perseroan menyajikan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas secara tersendiri.

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis kesinambungan usaha dan biaya historis. Laporan keuangan juga disusun berdasarkan basis akrual, kecuali laporan arus kas yang disusun berdasarkan basis kas.

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. namun jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan bagian tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka cerukan tersebut termasuk komponen kas dan setara kas. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung.

**b. Kas dan Setara Kas**

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai "Aset yang dibatasi penggunaannya" yang dikategorikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo yaitu pada saat selesai pembatasan penggunaannya.

**c. Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima**

Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima adalah pendapatan bunga dari kredit dengan kualitas lancar (*performing*) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya.

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAYA ARTA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**  
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)**

**d. Penempatan Pada Bank Lain**

Penempatan pada Bank lain merupakan Giro pada Bank lain, yaitu saldo rekening giro Bank, baik dalam Rupiah maupun dalam valuta asing di Bank lain dinyatakan sebesar saldo Giro pada tanggal neraca serta penempatan pada Bank lain (tabungan dan deposito berjangka) yang dinyatakan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan penyisihan penghapusan yang dibentuk berdasarkan hasil penelaahan terhadap kualitas dari penempatan dana pada Bank lain.

**e. Kredit Yang Diberikan**

Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BPR dan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk pengalihan piutang.

Kredit yang diberikan dalam neraca disajikan sebesar jumlah bersih (netto) setelah dikurangi oleh pendapatan provisi dan pendapatan administrasi atas kredit yang diberikan.

Cadangan Kerugian Penurunan nilai merupakan penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Jenis kredit menurut penggunaannya, antara lain Kredit investasi, modal kerja dan konsumsi.

Suku bunga efektif yang dihitung berdasarkan arus kas kontraktual pada dasarnya tidak dapat diubah sampai dengan seluruh Kewajiban Debitur dibayar lunas, termasuk ketika BPR memberikan keringanan suku bunga melalui restrukturisasi Kredit atau melakukan revisi estimasi pembayaran atau penerimaan bunga dan pokok.

Apabila BPR memberikan Kredit dengan skema bunga meningkat atau menurun yang telah diketahui sejak awal (sudah diperjanjikan), maka hal tersebut sudah harus diperhitungkan pada saat memperhitungkan awal arus kas untuk menentukan suku bunga efektif.

Kredit dengan suku bunga mengambang, perhitungan suku bunga efektif didasarkan pada arus kas dengan menggunakan suku bunga yang diestimasi pada awal pemberian kredit. Selanjutnya, suku bunga efektif akan disesuaikan pada saat penyesuaian suku bunga berikutnya. Suku bunga efektif akan berubah setiap kali dilakukan perubahan estimasi arus kas masa datang yang dihasilkan dari perubahan tingkat suku bunga.

Dalam menghitung suku bunga efektif, BPR harus memperhatikan secara cermat biaya transaksi yang meliputi pendapatan dan beban selain bunga (yang dapat diatribusikan secara langsung dengan pemberian/pembelian Kredit) yang harus diperhitungkan dalam estimasi arus kas masa datang.

Untuk kredit yang direstrukturisasi, dalam pokok kredit termasuk bunga dan biaya lain yang dialihkan menjadi pokok kredit. Bunga yang dialihkan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga ditangguhkan.

Kredit diklasifikasikan sebagai non-performing pada saat pokok kredit telah lewat jatuh tempo dan/atau pada saat manajemen berpendapat bahwa penerimaan atas pokok atau bunga kredit tersebut kurang lancar. Pendapatan bunga kredit yang telah diklasifikasikan sebagai non-performing tidak diperhitungkan dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

Sehubungan dengan penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP), BPR melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas pembentukan cadangan penurunan nilai kredit, dari sebelumnya disajikan sebagai Penyisihan Penghapusan Kredit Aktiva (PPKA) menjadi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). CKPN atas kredit yang diberikan dibentuk untuk mencerminkan estimasi kerugian yang timbul akibat tidak tertagihnya sebagian atau seluruh kredit, dengan mempertimbangkan kualitas kredit, kemampuan pembayaran debitur, nilai agunan, serta faktor relevan lainnya, sehingga nilai tercatat kredit yang disajikan dalam laporan keuangan mencerminkan kondisi yang wajar sesuai dengan ketentuan SAK EP.

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAYA ARTA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**  
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)**

**f. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai**

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal. Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana terdapat bukti objektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal kredit tersebut, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Evaluasi penurunan nilai dilakukan terhadap aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi, untuk seluruh jenis aset keuangan yang dimiliki oleh BPR, antara lain surat berharga, penempatan pada bank lain, kredit, dan penyertaan modal.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi penurunan nilai :

- 1) Sistematis dan konsisten sepanjang waktu.
- 2) Sejalan dengan kriteria yang bersifat objektif.
- 3) Didukung dengan dokumentasi yang memadai.

Identifikasi bukti objektif

- 1) Menetapkan peristiwa-peristiwa yang memenuhi kriteria sebagai bukti objektif terjadinya penurunan nilai kredit berdasarkan pengalaman dan tren historis, informasi yang tersedia, dengan disertai dengan analisis dasar perhitungan dan mendokumentasikan dalam kebijakan.
- 2) Penurunan nilai pada dasarnya disebabkan oleh dampak kombinasi dari beberapa peristiwa, kecuali peristiwa di masa datang yang diperkirakan dapat menimbulkan kerugian, terlepas hal tersebut sangat mungkin terjadi.
- 3) Faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan BPR dalam menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian akibat penurunan nilai telah terjadi meliputi informasi mengenai likuiditas, solvabilitas, dan eksposur risiko usaha dan risiko keuangan pihak debitur atau pihak penerbit, tingkat atau tren terjadinya tunggakan (*delinquencies*) untuk aset keuangan serupa, tren dan kondisi ekonomi nasional dan lokal, dan nilai wajar agunan dan jaminan. Faktor-faktor ini dan faktor-faktor lainnya, baik secara individual maupun secara bersama, dapat menjadi bukti objektif yang cukup bahwa kerugian akibat penurunan nilai telah terjadi dalam kredit atau kelompok kredit.

**Alur Pembentukan CKPN sebagai berikut :**

**a. Langkah Pertama: Penilaian Pemenuhan Kriteria Aset Baik**

BPR melakukan penilaian apakah aset keuangan memenuhi kriteria aset baik. Kriteria aset baik sebagai berikut :

- 1) aset keuangan diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia;
- 2) aset keuangan dijamin oleh LPS; dan/atau
- 3) aset keuangan tidak memiliki tunggakan lebih dari 7 (tujuh) hari dan tidak pernah dilakukan restrukturisasi. Dalam hal BPR melakukan perpanjangan kredit tanpa melihat kemampuan membayar debitur, hal tersebut

Apabila:

- 1) aset keuangan memenuhi kriteria aset baik, BPR dapat tidak membentuk CKPN atas aset keuangan tersebut
- 2) aset keuangan tidak memenuhi kriteria aset baik, BPR melakukan penilaian signifikansi aset keuangan (Langkah Kedua)

**b. Langkah Kedua: Penilaian Signifikansi**

BPR melakukan penilaian signifikansi aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria aset baik. Apabila:

- 1) aset keuangan signifikan, BPR melakukan penilaian terhadap aset keuangan tersebut secara individual
- 2) aset keuangan tidak signifikan, BPR membentuk CKPN secara kolektif.

**c. Langkah Ketiga: Penilaian Bukti Objektif Penurunan**

- 1) BPR melakukan penilaian secara individual terhadap aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria aset baik dan signifikan.

# PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAYA ARTA

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

### 2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

#### f. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (Lanjutan)

##### Alur Pembentukan CKPN sebagai berikut : (Lanjutan)

- 2) Penilaian dilakukan dengan menganalisis apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai atas aset keuangan. Apabila:
  - a. terdapat bukti objektif penurunan nilai, BPR membentuk CKPN individual;
  - b. tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai, BPR membentuk CKPN kolektif.

##### Perhitungan CKPN

Nilai CKPN didapatkan dari perkalian antara nilai PD, LGD, dan outstanding kredit (*exposure at default/EAD*).

$$\text{Penurunan nilai} = \text{PD} \times \text{LGD} \times \text{EAD}$$

##### a. Perhitungan PD

*Probability of Default*, yaitu tingkat kemungkinan kegagalan debitur memenuhi kewajiban yang dapat diukur berdasarkan beberapa pendekatan, antara lain *Migration Analysis*, *Roll Rates*, atau metode lainnya.

- 1) Perhitungan PD dengan *Net Flow*  
Pendekatan ini menggambarkan tingkat kemungkinan debitur gagal memenuhi kewajibannya yang dilihat dari perpindahan kredit ke bucket yang lebih buruk dari bulan ke bulan selama periode waktu tertentu.
- 2) Perhitungan PD dengan *Migration Analysis*  
Pendekatan ini menggambarkan tingkat kemungkinan debitur gagal memenuhi kewajibannya yang dilihat dari perpindahan kredit berdasarkan kualitas kredit pada periode waktu tertentu ke periode 1 tahun berikutnya

##### b. Perhitungan LGD

Dalam perhitungan penurunan nilai berdasarkan kolektif, BPR terlebih dahulu mengelompokkan kredit berdasarkan risiko kredit serupa (misalnya kredit berdasarkan jenis penggunaan, sektor ekonomi, skala UMKM, atau skema kredit). Jika BPR menetapkan pengelompokan kredit berdasarkan jenis penggunaan modal kerja, konsumtif, dan investasi, maka BPR membentuk LGD sesuai dengan kelompok kredit tersebut yaitu sebanyak 3 jenis LGD. Jika data tidak mendukung, BPR dapat membuat LGD all account. Pedoman BPR memperkenalkan dua cara perhitungan LG yaitu perhitungan LGD menggunakan *expected recovery* dan perhitungan LGD menggunakan *collateral shortfall*.

- 1) Perhitungan LGD menggunakan *Expected Recoveris*  
Perhitungan LGD dengan Metode *expected recoveries* menggunakan hasil dari *recovery* kredit yaitu kredit macet yang telah memenuhi kriteria *default* dan/atau hapus buku atas kredit yang telah dihapus buku.
- 2) Perhitungan LGD menggunakan *Collateral Shortfall*  
Perhitungan LGD Metode *Collateral shortfall* menggunakan data penerimaan dari hasil penjualan/eksekusi agunan yang telah dikuasai oleh BPR.

##### g. Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPR dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Nilai Tunai Penerimaan Kas Masa Depan adalah nilai tunai perkiraan arus kas masa depan dari total kewajiban debitur sesuai dengan perjanjian restrukturisasi kredit berdasarkan tingkat diskonto tertentu.

Restrukturisasi kredit dapat dilakukan antara lain melalui satu atau lebih cara sebagai berikut:

- a. Modifikasi syarat-syarat kredit, yang antara lain berupa:
  - (1) penurunan suku bunga kredit;
  - (2) perpanjangan jangka waktu kredit;

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAYA ARTA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**  
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)**

**g. Restrukturisasi Kredit (Lanjutan)**

Restrukturisasi kredit dapat dilakukan antara lain melalui satu atau lebih cara sebagai berikut: (Lanjutan)

a. Modifikasi syarat-syarat kredit, yang antara lain berupa: (Lanjutan)

- (3) pengurangan tunggakan bunga kredit baik secara absolut (tidak terdapat persyaratan tertentu) atau secara kontinjen (terdapat persyaratan tertentu dan telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya pembatalan pengurangan tunggakan bunga apabila kondisi usaha debitur membaik);
- (4) pengurangan jumlah pokok kredit baik secara absolut (tidak terdapat persyaratan tertentu) atau secara kontinjen (terdapat persyaratan tertentu dan telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya pembatalan pengurangan tunggakan pokok apabila kondisi usaha debitur membaik).

b. Penambahan fasilitas kredit baik melalui konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit baru baik dilakukan dalam satu akad kredit maupun dengan menerbitkan akad kredit baru.

**h. Agunan yang Diambil Alih**

Agunan yang Diambil Alih selanjutnya disingkat AYDA adalah aset yang diperoleh baik sebagian atau seluruhnya dengan cara pembelian melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada BPR dengan ketentuan agunan yang dibeli untuk dicairkan secepatnya.

Agunan yang diambil alih diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan POJK Nomor 1 tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank perekonomian Rakyat.

Penyelesaian kredit dilakukan apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit. Penyelesaian kredit dapat dilakukan melalui pengambilalihan agunan (Agunan Yang Diambil Alih/AYDA) atau melalui penjualan agunan untuk melunasi kewajiban debitur.

Pada saat pengambilalihan agunan, agunan yang diambil alih diakui sebagai AYDA dan dicatat sebesar nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, dengan jumlah maksimum sebesar kewajiban debitur. BPR tidak mengakui keuntungan pada saat pengambilalihan agunan tersebut.

Hasil penjualan agunan yang dikuasai oleh BPR diakui sebagai pengurang atas tagihan kredit yang terkait. Selisih antara nilai tercatat AYDA dengan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian operasional.

**Proses Penyelesaian Kredit :**

1. Pengambilalihan agunan debitur oleh BPR apabila debitur tidak mampu melunasi kewajibannya sesuai perjanjian kredit.
2. Pengakuan agunan sebagai AYDA, yang dicatat sebesar nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual dengan batas maksimum sebesar kewajiban debitur.
3. Pengelolaan AYDA sampai dengan agunan tersebut dapat dijual kembali.
4. Penjualan agunan yang diambil alih untuk memperoleh dana guna penyelesaian kewajiban debitur.
5. Pengakuan hasil penjualan sebagai pengurang tagihan kredit yang terkait dengan debitur tersebut.

Agunan yang diambil alih berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat pada Bab VI Pasal 39, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. BPR dapat mengambil alih agunan untuk penyelesaian Kredit yang memiliki kualitas macet.
2. Pengambilalihan agunan tersebut bersifat sementara.
3. Pengambilalihan agunan tersebut harus disertai dengan surat pernyataan penyerahan agunan atau surat kuasa menjual dari Debitur, dan surat keterangan lunas dari BPR kepada Debitur.
4. BPR wajib menilai AYDA pada saat pengambilalihan agunan untuk menetapkan nilai realisasi bersih.

# PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAYA ARTA

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

### 2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

#### h. Agunan yang Diambil Alih (Lanjutan)

Agunan yang diambil alih berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat pada Bab VI Pasal 39, dengan ketentuan sebagai berikut : (Lanjutan)

5. Penilaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan :
  - a. untuk AYDA dengan nilai sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dapat dilakukan oleh penilai intern BPR; dan
  - b. untuk AYDA dengan nilai lebih dari Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) wajib dilakukan oleh penilai independen.
6. Penilaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap setiap agunan.
7. BPR wajib melakukan penilaian kembali secara berkala terhadap AYDA sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan pedoman akuntansi BPR, dengan ketentuan:
  - a. dalam hal nilai AYDA mengalami penurunan, BPR wajib mengakui penurunan nilai tersebut sebagai kerugian; dan
  - b. dalam hal nilai AYDA mengalami peningkatan, BPR dilarang mengakui peningkatan nilai tersebut sebagai pendapatan.

Agunan yang diambil alih berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat pada Bab VI Pasal 40, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengambilalihan AYDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) bersifat sementara dan wajib dicairkan secepatnya terhitung sejak pengambilalihan AYDA oleh BPR
2. Apabila BPR tidak dapat melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai AYDA untuk jenis agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e dan huruf f yang tercatat pada laporan posisi keuangan BPR wajib diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan KPMM sebesar:
  - a. 15% (lima belas persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
  - b. 50% (lima puluh lima persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
  - c. 100% (seratus persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.
3. Apabila BPR tidak dapat melakukan upaya penyelesaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai AYDA untuk jenis agunan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e dan huruf f yang tercatat pada laporan posisi keuangan BPR wajib diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan KPMM sebesar:
  - a. 50% (lima puluh persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
  - b. 100% (seratus persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 2 (dua) tahun.
4. BPR wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. BPR wajib menerapkan perlakuan akuntansi pengambilalihan AYDA sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan pedoman akuntansi bagi BPR.

#### i. Aset Tetap

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya perolehan meliputi harga beli aset tetap termasuk biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang siap digunakan serta estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi relokasi. Pajak - pajak yang dikreditkan dan semua diskon dikurangkan dalam menentukan biaya. Revaluasi aset tetap tidak diperkenankan, kecuali dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah. Penyusutan dimulai pada saat aset tetap tersedia untuk digunakan dan berhenti ketika aset tetap dihapuskan. Penyusutan tidak berhenti ketika aset tidak digunakan.

# PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAYA ARTA

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

### 2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

#### i. Aset Tetap (Lanjutan)

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dengan rincian sebagai berikut

Jenis Aset Tetap	Umur Ekonomis Tahun	% Tarif Penyusutan
Bangunan	20 Tahun	5%
Kendaraan	8 Tahun	12,5% - 25%
Inventaris Kantor Golongan I	4 Tahun	25%
Inventaris Kantor Golongan II	8 Tahun	12,5%

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba-rugi pada saat terjadinya. Pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi. Aktiva tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap yang bersangkutan, dan keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang timbul dari penjualan aktiva tetap yang bersangkutan dilaporkan dalam laporan laba-rugi tahun berjalan.

#### j. Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud terdiri dari perangkat lunak yang dibeli Bank.

Perangkat lunak yang dibeli oleh Bank dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

Pengeluaran selanjutnya untuk perangkat lunak akan dikapitalisasi hanya jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomis aset yang bersangkutan di masa mendatang. Semua pengeluaran lainnya dibebankan pada saat terjadinya.

Aset tidak berwujud dihentikan pengakuannya jika dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari penggunaan atau pelepasannya.

Amortisasi diakui dalam laporan laba rugi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang masa manfaat dari perangkat lunak tersebut tersedia untuk dipakai.

#### k. Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain adalah pos-pos aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok pos aset yang ada dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri.

#### l. Kewajiban Segera

Kewajiban Segera adalah kewajiban yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar.

#### m. Utang Bunga

Utang Bunga merupakan pos yang dimaksudkan untuk menampung kewajiban BPR yang timbul dari pengakuan biaya bunga dari aktivitas yang terkait dengan fungsi BPR. Termasuk dalam pengertian kewajiban bunga adalah kewajiban bunga yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar.

#### n. Utang Pajak

Utang Pajak adalah kewajiban pajak penghasilan badan yang terutang atas penghasilan BPR.

#### o. Tabungan

PT BPR Daya Arta memberikan bunga atas tabungan masyarakat sebesar 0% - 4% per tahun dan dapat berubah disesuaikan dengan pangsa pasar.

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAYA ARTA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**  
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)**

**p. Deposito Berjangka**

PT BPR Daya Arta memberikan bunga atas simpanan deposito berjangka dan disesuaikan dengan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

**q. Simpanan**

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (di luar bank umum atau BPR lain) kepada BPR berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.

Simpanan dari Bank Lain adalah kewajiban BPR kepada bank lain, dalam bentuk tabungan dan deposito.

**r. Pinjaman Yang Diterima**

Pinjaman yang diterima adalah fasilitas pinjaman yang diterima dari Bank atau pihak lain termasuk Bank Indonesia baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, dan harus dibayar bila telah jatuh tempo.

Pinjaman yang diterima disajikan dalam neraca sebesar jumlah bersih (netto) setelah dikurangi provisi dan biaya transaksi yang dibebankan.

Provisi dan biaya transaksi atas pinjaman yang diterima diamortisasi secara sistematis sesuai dengan jangka waktu atas pinjaman yang diterima.

Pinjaman Diterima adalah dana yang diterima dari bank umum dan BPR lain, Bank Indonesia atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

**s. Transaksi-transaksi dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa**

PT BPR Daya Arta mengungkapkan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Suatu pihak mempunyai hubungan istimewa dengan entitas jika :

- i. Secara langsung, atau tidak langsung melalui atau lebih perantara, pihak tersebut
  - a. Mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada dibawah pengendalian bersama dengan, entitas (termasuk entitas induk, entitas anak, dan *fellow subsidiaries*)
  - b. Memiliki kepemilikan di entitas yang memberikan pengaruh signifikan atas entitas; atau
  - c. Memiliki pengendalian bersama atau entitas
- ii. Pihak tersebut adalah entitas asosiasi dari entitas
- iii. Pihak tersebut adalah joint ventures dimana entitas tersebut merupakan venture
- iv. Pihak tersebut adalah personil manajemen kunci entitas atau entitas induknya
- v. Pihak tersebut adalah keluarga dekat dari setiap orang yang diuraikan dalam (i) atau (iv) Pihak tersebut adalah entitas yang dikendalikan, bersama atau memiliki hak suara secara signifikan, secara langsung atau tidak langsung, setiap orang yang diuraikan dalam (iv) atau (v) atau
- vi. Pihak tersebut adalah program imbalan pascakerja untuk imbalan pekerja entitas, atau setiap entitas yang mempunyai hubungan istimewa dengan entitas tersebut.

**t. Sewa**

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAYA ARTA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**  
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)**

**u. Kewajiban Kontinjensi**

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang belum pasti. Perseroan tidak mengakui kewajiban kontinjensi sebagai kewajiban. Kewajiban kontinjensi diungkapkan pada tanggal pelaporan, uraian dan sifat kewajiban kontinjensi jika praktis dilakukan.

**v. Pinjaman Subordinasi**

Pinjaman Subordinasi adalah pinjaman yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Ada perjanjian tertulis antara BPR dan pemberi pinjaman;
- 2) Ada persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia;
- 3) Tidak dijamin oleh BPR yang bersangkutan dan telah disetor penuh;
- 4) Minimum berjangka waktu 5 (lima) tahun

**w. Pendapatan dan Beban**

Definisi Pendapatan sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Operasional mencakup semua pendapatan yang berasal dari kegiatan utama BPR. Pendapatan operasional terdiri dari pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya.
- 2) Pendapatan Bunga adalah pendapatan yang diperoleh dari penanaman dana BPR pada aset produktif, dimana pendapatan bunga termasuk provisi dikurangi biaya-biaya yang terkait langsung dalam penyaluran kredit yang ditanggung oleh BPR (biaya transaksi).
- 3) Provisi adalah biaya yang harus dibayar debitur pada saat kredit disetujui dan biasanya dinyatakan dalam persentase.
- 4) Biaya Transaksi adalah semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR, misalnya marketing fee. Dalam hal biaya transaksi dibebankan kepada nasabah maka biaya tersebut tidak termasuk dalam biaya perolehan pemberian kredit.
- 5) Pendapatan Operasional Lainnya adalah berbagai pendapatan yang timbul dari aktivitas yang mendukung kegiatan operasional BPR.

**I Pendapatan Bunga**

Pendapatan bunga antara lain berasal dari kredit yang diberikan, penempatan pada bank lain, dan Sertifikat Bank Indonesia.

**II Pendapatan Operasional Lainnya**

- a) Pendapatan operasional lainnya berasal dari kegiatan jasa yang mendukung operasional BPR sesuai dengan ketentuan.
- b) Contoh dari pendapatan operasional lainnya adalah komisi/fee dari transaksi *payment point*, jasa pengiriman uang, transaksi ATM, pendapatan administrasi tabungan, pinalti pencairan deposito lebih awal, keuntungan akibat penjualan kas dalam valuta asing, keuntungan akibat penjualan SBI, denda yang valuta asing, keuntungan akibat penjualan SBI, denda yang dikenakan oleh BPR kepada nasabah, penerimaan dari kredit yang telah dihapus buku, pemulihan penyisihan kerugian kredit dan lain-lain.

**Beban Operasional**

Beban Operasional dirinci menjadi :

- 1) Beban bunga
  - a) Beban bunga adalah beban yang dibayarkan kepada nasabah atau pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana dan penerimaan pinjaman.
  - b) Beban bunga timbul dari kegiatan pendanaan berupa kegiatan penghimpunan dana dan penerimaan pinjaman, misalnya tabungan dan deposito, termasuk premi penjaminan simpanan, *cash back* dan hadiah deposito berjangka.

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAYA ARTA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**  
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)**

**w. Pendapatan dan Beban (Lanjutan)**

**Beban Operasional (Lanjutan)**

Beban Operasional dirinci menjadi : (Lanjutan)

- c) Beban bunga disajikan secara terpisah dari pendapatan bunga untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai komposisi dan alasan perubahan nilai neto bunga.
- d) Penjelasan lebih lanjut mengenai beban bunga mengacu pada Bab V tentang Akuntansi Kewajiban.
- 2) Beban penyisihan kerugian.
- 3) Beban pemasaran, termasuk pemberian hadiah yang tidak dapat diatribusikan, iklan dalam rangka promosi, dan biaya transaksi atas kredit yang tidak disetujui.
- 4) Beban penelitian dan pengembangan yaitu biaya yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh BPR.
- 5) Beban administrasi dan umum adalah berbagai beban yang timbul untuk mendukung kegiatan operasional BPR.
- 6) Beban operasional lainnya adalah biaya operasional yang tidak termasuk dalam salah satu biaya operasional di atas, misalnya kerugian akibat penjualan kas dalam valuta asing, kerugian akibat penjualan SBI.

**x. Imbalan Pasca Kerja**

Imbalan pasca kerja merupakan imbalan yang terutang kepada karyawan setelah berakhirnya masa kerja, yang meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Sesuai dengan SAK EP paragraf 28, Perusahaan belum mengakui kewajiban imbalan pasca kerja sebagai kewajiban imbalan pasti yang diukur berdasarkan kewajiban yang timbul pada tanggal pelaporan, dengan mempertimbangkan masa kerja karyawan, tingkat gaji, serta ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

**y. Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dihitung atas penghasilan kena pajak Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

**Pajak Kini**

Pajak penghasilan kini diakui sebagai beban pada periode berjalan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak menurut laporan keuangan yang telah disesuaikan dengan koreksi fiskal positif maupun negatif sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

**Pajak Tangguhan**

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya, menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui hanya apabila besar kemungkinan bahwa laba kena pajak yang memadai akan tersedia di masa mendatang untuk dikompensasikan terhadap perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tersebut. Perusahaan mengevaluasi kemungkinan realisasi aset pajak tangguhan pada setiap tanggal pelaporan dengan mempertimbangkan riwayat laba atau rugi fiskal beberapa tahun terakhir, proyeksi laba kena pajak di masa mendatang berdasarkan asumsi yang dapat dipertahankan, serta kondisi kelangsungan usaha Perusahaan.

Pada tahun 2025, Perusahaan untuk pertama kalinya mengakui aset pajak tangguhan sehubungan dengan penerapan SAK EP atas perbedaan temporer yang berasal dari cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) kredit yang diberikan.

# PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAYA ARTA

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

### 3. KAS

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Kas :		
Kas	36.737.000	30.628.700
<b>Jumlah Kas</b>	<b><u>36.737.000</u></b>	<b><u>30.628.700</u></b>

### 4. PENDAPATAN BUNGA YANG AKAN DITERIMA

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Bunga Penempatan Bank lain	4.913.698	19.574.316
Bunga Kredit Modal Kerja	155.569.170	274.059.883
Bunga Kredit Konsumtif	222.469.888	239.661.689
<b>Jumlah Pendapatan Bunga yang Akan Diterima</b>	<b><u>382.952.756</u></b>	<b><u>533.295.888</u></b>

### 5. PENEMPATAN PADA BANK LAIN

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>Giro:</b>		
PT Bank BCA	1.011.902.948	242.994.040
PT Bank Mandiri	15.978.397	15.978.397
PT Bank Sinarmas	40.127.897	41.124.713
	<b><u>1.068.009.242</u></b>	<b><u>300.097.150</u></b>
<b>Tabungan</b>		
PT BPR Lestari Bali	125.801	-
PT BPR Sri Artha Lestari	-	880.170.811
PT BPR Rasyid	653.306.838	653.722.036
PT Bank Mandiri	6.897.054.048	7.162.114.591
PT BPRS Bina Amwalul Hasanah	699.978.060	686.127.207
PT BPRS Mustindo	509.866.664	634.200.000
PT BPRS Rifaul Ummah	-	427.384.051
PT BPR Koperindo Jaya	776.437.600	764.357.766
PT BPRS Mulia Berkah Abadi	250.000.001	500.000.001
PT BPR Luna Sinar Indonesia	-	829.349.362
	<b><u>9.786.769.013</u></b>	<b><u>12.537.425.825</u></b>
<b>Deposito</b>		
Deposito 1 Bulan	100.000.000	650.000.000
Deposito 3 Bulan	1.600.000.000	2.900.000.000
Deposito 6 Bulan	3.500.000.000	8.100.000.000
Deposito 12 Bulan	10.150.000.000	10.800.000.000
	<b><u>15.350.000.000</u></b>	<b><u>22.450.000.000</u></b>
	<b><u>26.204.778.255</u></b>	<b><u>35.287.522.975</u></b>
CKPN Antar Bank Aktiva	-	(25.890.465)
<b>Jumlah penempatan pada bank lain</b>	<b><u>26.204.778.255</u></b>	<b><u>35.261.632.510</u></b>
<b>CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ABA</b>		
Saldo awal	(25.890.465)	(49.305.419)
Pembentukan tahun berjalan	(5.026.260.187)	-
Pengembalian kelebihan penyisihan ABA	5.052.150.652	23.414.954
<b>Saldo Akhir</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>(25.890.465)</u></b>

# PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAYA ARTA

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

### 6. KREDIT YANG DIBERIKAN

	2025	2024
<b>a. KYD Berdasarkan Penggunaannya</b>		
Kredit Modal Kerja	51.721.168.907	60.336.146.550
Kredit Konsumtif	24.916.376.377	23.271.682.348
	<b>76.637.545.284</b>	<b>83.607.828.898</b>
KYD - Provisi	(149.215.189)	(152.598.305)
Pendapatan ditangguhkan	(1.175.003.317)	(1.288.860.811)
<b>Jumlah</b>	<b>75.313.326.778</b>	<b>82.166.369.782</b>
Cadangan Kerugian Penilaian Nilai	(1.019.712.273)	(1.601.051.846)
<b>Jumlah</b>	<b>74.293.614.505</b>	<b>80.565.317.936</b>
<b>b. KYD berdasarkan kolektibilitas</b>		
- Lancar	48.259.752.009	57.877.683.992
- Dalam Perhatian Khusus	5.965.660.526	6.383.313.701
- Kurang Lancar	4.124.637.520	4.521.186.744
- Diragukan	4.614.517.829	873.439.884
- Macet	13.672.977.400	13.952.204.577
	<b>76.637.545.284</b>	<b>83.607.828.898</b>
KYD - Provisi	(149.215.189)	(152.598.305)
Pendapatan ditangguhkan	(1.175.003.317)	(1.288.860.811)
	75.313.326.778	82.166.369.782
Cadangan Kerugian Penilaian Nilai	(1.019.712.273)	(1.601.051.846)
<b>Jumlah</b>	<b>74.293.614.505</b>	<b>80.565.317.936</b>
<b>c. KYD Berdasarkan keterkaitan</b>		
Pihak Terkait	1.826.690.821	351.750.377
Pihak Tidak Terkait	74.810.854.463	83.256.078.521
<b>Jumlah</b>	<b>76.637.545.284</b>	<b>83.607.828.898</b>
KYD - Provisi	(149.215.189)	(152.598.305)
Pendapatan ditangguhkan	(1.175.003.317)	(1.288.860.811)
	<b>75.313.326.778</b>	<b>82.166.369.782</b>
Cadangan Kerugian Penilaian Nilai	(1.019.712.273)	(1.601.051.846)
<b>Jumlah</b>	<b>74.293.614.505</b>	<b>80.565.317.936</b>
<b>d. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai</b>		
<b>Saldo awal</b>	(1.601.051.846)	(3.944.629.963)
Pembentukan tahun berjalan	(7.497.654.011)	55.900.809
Pemulihan CKPN	8.078.993.584	-
Hapus buku tahun berjalan	-	2.287.677.308
<b>Saldo Akhir</b>	<b>(1.019.712.273)</b>	<b>(1.601.051.846)</b>

### 7. AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH

	2025	2024
Agunan yang diambil alih < 1 tahun	280.960.702	449.993.268
Agunan yang diambil alih > 1 tahun	5.993.246.171	5.543.252.903
	<b>6.274.206.872</b>	<b>5.993.246.171</b>

# PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAYA ARTA

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

### 7. AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (LANJUTAN)

Agunan yang diambil alih < 1 tahun	Nilai Agunan	Agunan
Jesaja Kosasih	280.960.702	SHM
<b>Agunan yang diambil alih &lt; 1 tahun</b>		
Aryo Wijoyo	498.478.091	SHM
Yodi Aaron	498.478.091	SHM
Kevin Octaviano	498.478.091	SHM
Piter	498.478.091	SHM
Ronaldo Aprilio	498.478.091	SHM
Rasini	587.121.633	SHM
Dewi Saraswati	246.666.659	SHM
Achmad Sjafiul Umam	205.204.835	SHM
Djamaludin Tanuwidjaja	161.869.320	SHM
Hamid Tanuwidjaja	449.993.268	SHM
Ferry Bayu Nirwono T, S.E.	350.000.000	SHM
Go Tji Seng	700.000.000	SHM
Rakhi Raviany	500.000.000	SHM
Rakhi Raviany	300.000.000	SHM
<b>Jumlah Agunan yang Diambil Alih</b>	<b><u>6.274.206.872</u></b>	

### 8. ASET LAIN-LAIN

	2025	2024
Asuransi dibayar dimuka	6.144.278	4.995.062
Persediaan barang cetakan	250.000	1.180.000
Lainnya	4.125.001	-
Biaya dibayar dimuka Premi LPS	1	-
Beban ditangguhkan	879.086.019	424.704.710
<b>Jumlah Aset Lain-lain</b>	<b><u>889.605.299</u></b>	<b><u>430.879.772</u></b>

### 9. ASET TETAP

	2025			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	
<b>Nilai Perolehan:</b>				
Tanah	3.356.388.000	-	-	3.356.388.000
Bangunan	643.612.000	-	-	643.612.000
Kendaraan	634.855.000	-	-	634.855.000
Inventaris Kantor	749.937.952	3.083.200	-	753.021.152
<b>Jumlah</b>	<b><u>5.384.792.952</u></b>	<b><u>3.083.200</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>5.387.876.152</u></b>
<b>Akumulasi Penyusutan :</b>				
Bangunan	8.045.150	32.180.599	-	40.225.749
Kendaraan	611.467.498	23.387.498	-	634.854.996
Inventaris Kantor	712.949.223	22.110.537	-	735.059.760
<b>Jumlah</b>	<b><u>1.332.461.871</u></b>	<b><u>77.678.634</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>1.410.140.505</u></b>
<b>Nilai Buku</b>	<b><u>4.052.331.081</u></b>			<b><u>3.977.735.647</u></b>

# PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAYA ARTA

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

### 9. ASET TETAP (LANJUTAN)

	2024			Saldo Akhir
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	
<b>Nilai Perolehan:</b>				
Tanah	-	3.356.388.000	-	3.356.388.000
Bangunan	-	643.612.000	-	643.612.000
Kendaraan	634.855.000	-	-	634.855.000
Inventaris Kantor	730.937.952	19.000.000	-	749.937.952
<b>Jumlah</b>	<b>1.365.792.952</b>	<b>4.019.000.000</b>	<b>-</b>	<b>5.384.792.952</b>
<b>Akumulasi Penyusutan :</b>				
Bangunan	-	8.045.150	-	8.045.150
Kendaraan	564.692.498	46.775.000	-	611.467.498
Inventaris Kantor	668.972.194	43.977.029	-	712.949.223
<b>Jumlah</b>	<b>1.233.664.692</b>	<b>98.797.179</b>	<b>-</b>	<b>1.332.461.871</b>
<b>Nilai Buku</b>	<b>132.128.260</b>			<b>4.052.331.081</b>

### 10. ASET TIDAK BERWUJUD

	2025			Saldo Akhir
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	
<b>Nilai Perolehan:</b>				
Software IT	254.130.690	-	-	254.130.690
<b>Jumlah</b>	<b>254.130.690</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>254.130.690</b>
<b>Akumulasi Amortisasi</b>				
Software IT	(246.986.936)	(7.143.748)		(254.130.684)
<b>Jumlah</b>	<b>(246.986.936)</b>	<b>(7.143.748)</b>	<b>-</b>	<b>(254.130.684)</b>
<b>Nilai Buku</b>	<b>7.143.754</b>			<b>6</b>

	2024			Saldo Akhir
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	
<b>Nilai Perolehan:</b>				
Software IT	254.130.690	-	-	254.130.690
<b>Jumlah</b>	<b>254.130.690</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>254.130.690</b>
<b>Akumulasi Amortisasi</b>				
Software IT	(237.461.936)	(9.525.000)	-	(246.986.936)
<b>Jumlah</b>	<b>(237.461.936)</b>	<b>(9.525.000)</b>	<b>-</b>	<b>(246.986.936)</b>
<b>Nilai Buku</b>	<b>16.668.754</b>			<b>7.143.754</b>

### 11. KEWAJIBAN SEGERA

	2025	2024
PPh Pasal 4 Ayat 2	116.985.623	137.318.621
PPh Pasal 21	23.070.681	(15.489.515)
Titipan lainnya	25.454.500	6.665.000
<b>Jumlah Kewajiban Segera</b>	<b>165.510.804</b>	<b>128.494.106</b>

### 12. UTANG BUNGA

	2025	2024
Deposito Pihak Ketiga	291.459.461	387.244.755
<b>Jumlah Utang Bunga</b>	<b>291.459.461</b>	<b>387.244.755</b>

# PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAYA ARTA

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

### 13. UTANG PAJAK

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Utang Pajak	-	82.368
<b>Jumlah Utang Pajak</b>	<b>-</b>	<b>82.368</b>

### 14. SIMPANAN

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Tabungan	1.171.157.442	1.920.602.899
Deposito	102.061.461.166	116.975.910.255
<b>Jumlah Simpanan</b>	<b>103.232.618.608</b>	<b>118.896.513.154</b>

#### a. Tabungan

Tabungan umum	325.325.080	858.251.800
Tabungan PHK	524.766.589	797.321.640
Tabungan Perantara	294.787.764	235.605.609
Tabungan Berjangka	14.879.398	26.616.628
Tabungan Junior	11.398.611	2.807.222
<b>Jumlah</b>	<b>1.171.157.442</b>	<b>1.920.602.899</b>

#### Pihak keterkaitan

Pihak terkait	394.205.178	797.321.640
Pihak tidak terkait	776.952.265	1.123.281.259
<b>Jumlah</b>	<b>1.171.157.442</b>	<b>1.920.602.899</b>

Tingkat bunga rata-rata tabungan per tahun adalah sebesar 3% -4. 5% untuk tahun 2025.

Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk tabungan dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa diberikan dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan tingkat bunga yang diberikan kepada pihak ketiga.

#### b. Deposito

Deposito Berjangka 1 bulan	49.640.848.319	60.528.155.842
Deposito Berjangka 3 bulan	10.361.694.797	9.472.789.811
Deposito Berjangka 6 bulan	3.533.763.186	5.973.586.170
Deposito Berjangka 12 bulan	38.485.154.864	40.906.378.432
Deposito Berjangka 24 bulan	40.000.000	95.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>102.061.461.166</b>	<b>116.975.910.255</b>

#### Pihak keterkaitan

Pihak terkait	18.571.299.285	25.223.890.427
Pihak tidak terkait	83.490.161.881	91.752.019.828
<b>Jumlah</b>	<b>102.061.461.166</b>	<b>116.975.910.255</b>

Tingkat bunga rata-rata deposito per tahun adalah sebesar 5.25% - 6.25% untuk tahun 2025.

Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk deposito berjangka yang diberikan kepada pihak hubungan istimewa diberikan dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan yang diberikan kepada pihak ketiga.

### 15. DANA SETORAN MODAL

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Titipan Dana Setoran Modal	930.000.000	-
<b>Jumlah Dana Setoran Modal</b>	<b>930.000.000</b>	<b>-</b>

Bank menerima Titipan dana setoran modal dalam bentuk Deposito escrow Rp930.000.000 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) atas nama Tuan Susilo Goetomo. Dana tersebut bukan merupakan bagian dari modal disetor dan dicatat sebagai liabilitas lain-lain, karena akan dikembalikan kepada pemilik dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAYA ARTA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**  
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**16. KEWAJIBAN LAIN-LAIN**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Pendapatan Bunga Yang Ditangguhkan	15.272.810	20.486.506
Rekening perantara	55.292.822	-
<b>Jumlah Kewajiban Lain-lain</b>	<b>70.565.632</b>	<b>20.486.506</b>

**17. MODAL SAHAM**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Modal dasar	20.000.000.000	20.000.000.000
Modal belum disetor	(8.430.000.000)	(8.430.000.000)
<b>Jumlah Modal Saham</b>	<b>11.570.000.000</b>	<b>11.570.000.000</b>

Pada akta no. 95 tanggal 22 Februari 2019 oleh Notaris Hannywati Gunawan, S.H, modal disetor sebesar Rp8.070.000.000,- (delapan miliar tujuh puluh juta rupiah). Pada akta no. 51 tanggal 29 November 2019 oleh Notaris Dr. Ir. Yohanes Wilion, S.E., S.H., M.M., modal disetor menjadi Rp8.770.000.000,- (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah). Pada akta no. 10 tanggal 13 Januari 2020 oleh Notaris Dr. Ir. Yohanes Wilion, S.E., S.H., M.M., modal disetor menjadi Rp10.070.000.000,- (sepuluh miliar tujuh puluh juta rupiah). Terjadi penambahan modal disetor menjadi Rp11.570.000.000,- (sebelas miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) pada akta no. 2 tanggal 3 Februari 2020 oleh Notaris Dr. Ir. Yohanes Wilion S.E., S.H., M.M.,

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Perekonomian Rakyat Daya Arta No. 45 tanggal 24 Januari 2025 dibuat oleh Notaris Adiinto Sinaga, S.H., M.Kn. Tambahan modal disetor Rp 930.000.000 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) yang semula Rp. 11.570.000.000 (sebelas miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) menjadi 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) yang terbagi atas 1.250 (seribu dua ratus lima puluh). Dana setoran modal tersebut ditempatkan dalam bentuk deposito escrow dan belum tercatat sebagai tambahan modal disetor sampai dengan diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

<b>Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>Persentase Kepemilikan (%)</b>	<b>Jumlah</b>
Mutia Djuwita Wijajamukti (Mutia Djuwita)	269	23,25%	2.690.000.000
Irawan Jahjadi	269	23,25%	2.690.000.000
Susilo Goetomo	619	53,50%	6.190.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>1.157</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.570.000.000</b>

**18. TAMBAHAM MODAL DISETOR**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Susilo Goetomo	930.000.000	930.000.000
<b>Jumlah Tambahan Modal Disetor</b>	<b>930.000.000</b>	<b>930.000.000</b>

Berdasarkan akta No.45 Tanggal 24 Januari 2025 oleh notaris Adiinto Sinaga, S.H., M.Kn, dana setoran modal ini masih menunggu persetujuan OJK.

**19. SALDO LABA**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Laba Ditahan	(5.058.345.077)	(4.105.161.371)
Laba Tahun Berjalan	(200.073.793)	(953.183.706)
<b>Jumlah Saldo Laba</b>	<b>(5.258.418.871)</b>	<b>(5.058.345.077)</b>

# PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAYA ARTA

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

### 20. PENDAPATAN BUNGA

	2025	2024
<b>Dari Bank Lain:</b>		
Pendapatan Bunga Giro	4.901.368	4.539.181
Pendapatan Bunga Tabungan	301.879.634	609.451.875
Pendapatan Bunga Deposito Berjangka	1.301.310.842	1.722.617.734
	<b>1.608.091.843</b>	<b>2.336.608.790</b>
<b>Pendapatan Bunga Kredit</b>		
Bunga Kredit Modal Kerja	4.795.155.836	5.825.264.047
Bunga Kredit Konsumtif	2.461.827.107	2.264.504.102
	<b>7.256.982.943</b>	<b>8.089.768.149</b>
<b>Pendapatan Provisi dan Komisi</b>		
Provisi Kredit & Administrasi	133.517.363	223.630.001
	<b>133.517.363</b>	<b>223.630.001</b>
<b>Jumlah Pendapatan Bunga</b>	<b>8.998.592.149</b>	<b>10.650.006.940</b>

### 21. BEBAN BUNGA

	2025	2024
<b>Beban Bunga Kepada Pihak Lain</b>		
Tabungan	49.493.105	96.781.909
Deposito Berjangka	7.379.206.451	8.380.099.416
	<b>7.428.699.556</b>	<b>8.476.881.325</b>
Simpanan Bank Lain	2.071.233	
Premi LPS	219.000.811	252.686.674
Biaya transaksi	-	146.288.421
	<b>221.072.044</b>	<b>398.975.095</b>
<b>Jumlah beban bunga</b>	<b>7.649.771.600</b>	<b>8.875.856.420</b>

### 22. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

	2025	2024
Pendapatan Administrasi Kredit	144.300.000	-
Denda keterlambatan	43.362.203	50.956.615
Penalty	1.100.000	2.100.000
Administrasi tabungan	13.209.051	10.263.986
Pemulihan PPAP	607.230.038	79.315.763
Lainnya	4.928.609	1.575.000
Penilaian agunan nasabah	16.787.500	12.037.500
Kredit hapus buku	264.283.000	127.940.211
<b>Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya</b>	<b>1.095.200.401</b>	<b>284.189.075</b>

### 23. BEBAN PEMASARAN

	2025	2024
Beban promosi dan iklan	-	4.049.280
<b>Jumlah Beban Pemasaran</b>	<b>-</b>	<b>4.049.280</b>

### 24. BEBAN UMUM & ADMINISTRASI

	2025	2024
<b>Beban Tenaga Kerja</b>		
Beban Gaji & Upah	1.304.980.000	1.068.356.452
Honorarium	393.481.793	390.075.740

# PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAYA ARTA

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

### 24. BEBAN UMUM & ADMINISTRASI (LANJUTAN)

	2025	2024
<b>Beban Tenaga Kerja Lainnya</b>		
THR	87.958.333	101.300.000
Uang Makan	18.070.000	233.360.000
Insentif	1.900.000	24.550.000
Tunjangan PPh 21	79.367.917	71.946.000
BPJS	98.398.710	99.315.109
Lembur	6.774.000	3.345.000
Tenaga kerja lainnya	32.028.750	121.000.000
	<b>2.022.959.503</b>	<b>2.113.248.301</b>
<b>Beban Pendidikan</b>		
Biaya pendidikan tenaga kerja	28.014.500	45.525.500
	<b>28.014.500</b>	<b>45.525.500</b>
<b>Beban Sewa</b>		
Gedung kantor	-	150.000.000
	-	<b>150.000.000</b>
<b>Beban Pajak-pajak</b>		
Pajak Bumi dan Bangunan	11.433.835	8.065.591
Pajak Kendaraan	8.892.600	9.189.500
Pajak Lainnya	2.568.408	1.795.079
	<b>22.894.843</b>	<b>19.050.170</b>
<b>Beban Pemeliharaan dan Perbaikan</b>		
Gedung	3.309.000	149.500
Kendaraan Kantor	12.383.813	25.059.255
Inventaris Kantor	2.650.000	3.245.000
Pemeliharaan software	42.000.000	42.400.000
	<b>60.342.813</b>	<b>70.853.755</b>
<b>Beban Penyusutan/Amortisasi</b>		
Gedung	32.180.599	8.045.150
Inventaris	22.110.537	43.977.029
Kendaraan	23.387.498	46.775.000
Penyusutan Aktiva Tidak Berwujud	7.143.748	9.525.000
	<b>84.822.383</b>	<b>108.322.179</b>
<b>Beban Barang dan Jasa</b>		
Alat tulis kantor dan cetak	8.896.400	28.505.237
Cetakan	10.712.000	13.464.500
Pengiriman dokumen	1.163.650	2.141.793
Materai	3.322.000	5.090.000
Listrik	45.322.332	51.970.359
Air	16.260.089	11.096.800
Telepon dan internet	23.292.443	22.717.828
Bensin	19.890.301	24.452.988
Perjalanan dinas	389.000	861.500
Parkir dan tol	19.070.951	20.047.457
Administrasi bank	3.632.900	700.700
Notaris	5.500.000	100.050.000
Perlengkapan dan peralatan kantor	4.402.500	13.349.194
Rumah tangga kantor	5.523.800	3.007.400
Barang dan jasa lainnya	6.191.999	6.062.000
Akuntan Publik	19.445.000	19.445.000
Klaim asuransi kendaraan	300.000	5.900.000
	<b>193.315.365</b>	<b>328.862.756</b>

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAYA ARTA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**  
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

**24. BEBAN UMUM & ADMINISTRASI (LANJUTAN)**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>Beban Asuransi</b>		
Asuransi Kendaraan	9.581.192	9.993.157
Asuransi Gedung	794.450	919.585
	<b>10.375.642</b>	<b>10.912.742</b>
<b>Jumlah Beban Administrasi dan Umum</b>	<b>2.422.725.049</b>	<b>2.846.775.403</b>

**25. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Keamanan dan kebersihan	-	7.659.000
Jamuan tamu	3.425.000	16.728.658
Lain-lain	4.447.500	51.012.500
Tahunan OJK	56.378.166	-
Iklan BPR	6.164.200	-
Iuran Perbarindo	18.000.000	-
<b>Jumlah Beban Operasional Lainnya</b>	<b>88.414.866</b>	<b>75.400.158</b>

**26. PENDAPATAN ( BEBAN ) LAIN-LAIN**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>Pendapatan Non Operasional</b>		
Komisi Fee Asuransi	13.767.135	11.099.895
Lainnya	87.925	6.916.030
	<b>13.855.060</b>	<b>18.015.925</b>
<b>Beban Non Operasional</b>		
Sumbangan	2.402.500	4.400.000
Iuran perbarindo bengkulu	-	18.000.000
Denda	1.010.000	500.000
Iuran OJK	-	63.487.985
Lainnya	1.250.000	16.926.400
Selisih Kas	15.432	-
Biaya Hampers	3.870.000	-
Keamanan dan Kebersihan	8.046.000	-
Edukasi dan Literasi	2.321.250	-
	<b>18.915.182</b>	<b>103.314.385</b>
<b>Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional</b>	<b>(5.060.122)</b>	<b>(85.298.460)</b>

**27. PERPAJAKAN**

**a. Beban Pajak Penghasilan - Kini**

Rekonsiliasi antar laba komersial sebelum pajak penghasilan dengan laba kena pajak untuk tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Laba (Rugi) Komersial	(72.179.087)	(953.183.706)
Koreksi Fiskal Negatif :		
- Pemulihan CKPN KYD	(581.339.573)	-
Koreksi fiskal Positif:		
- Sumbangan	2.402.500	-
- Denda	1.010.000	-

# PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAYA ARTA

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

#### 27. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

##### a. Beban Pajak Penghasilan - Kini (lanjutan)

	2025	2024
Koreksi fiskal Positif: (Lanjutan)		
- Biaya Hampers	3.870.000	-
- Jamuan Tamu	3.425.000	-
- Lainnya	1.250.000	38.037.158
	<b>(652.268.661)</b>	<b>(915.146.548)</b>
Kompensasi fiskal	(4.645.661.182)	(3.730.514.634)
Jumlah Kompensasi fiskal	<b>(5.297.929.843)</b>	<b>(4.645.661.182)</b>

Adapun akumulasi kerugian fiskal sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.297.929.843 yang dirinci sebagai berikut:

Laba/(Rugi)	2023	(3.730.514.634)	(3.730.514.634)
Laba/(Rugi)	2024	(915.146.548)	(915.146.548)
Laba/(Rugi)	2025	(652.268.661)	-
		<b>(5.297.929.843)</b>	<b>(4.645.661.182)</b>

##### b. Pajak Tangguhan

Pada tahun berjalan, BPR untuk pertama kalinya menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). Sehubungan dengan penerapan tersebut, BPR mengakui kewajiban imbalan kerja karyawan dan cadangan biaya lainnya berdasarkan metode akrual sesuai ketentuan SAK EP.

Pengakuan kewajiban tersebut menimbulkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan karena beban diakui secara komersial pada saat kewajiban timbul, sedangkan secara fiskal beban tersebut baru dapat dikurangkan pada saat dilakukan pembayaran. Atas perbedaan temporer tersebut, BPR mengakui aset pajak tangguhan pada akhir periode pelaporan.

##### Tabel perhitungan Pajak Tangguhan

No.	Keterangan	Beda Temporer	Tarif Pajak	Pajak Tangguhan
1	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(581.339.573)	22%	(127.894.706)
	<b>Total Beban Pajak Tangguhan</b>	<b>(581.339.573)</b>		<b>(127.894.706)</b>

##### Rekonsiliasi Pajak Tangguhan

	2025	2024
<b>a. Aset Pajak Tangguhan</b>		
Saldo awal aset pajak tangguhan	-	-
Pengakuan aset pajak tangguhan tahun berjalan	-	-
<b>Saldo akhir aset pajak tangguhan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>b. Liabilitas Pajak Tangguhan</b>		
Saldo awal Liabilitas pajak tangguhan	-	-
Pengakuan Liabilitas pajak tangguhan tahun berjalan	127.894.706	-
<b>Saldo akhir Liabilitas pajak tangguhan</b>	<b>127.894.706</b>	<b>-</b>

##### PAJAK TANGGUHAN

Liabilitas pajak tangguhan sebesar Rp127.894.706 diakui untuk pertama kalinya pada tahun 2025 sehubungan dengan penerapan SAK EP, yang bersumber seluruhnya dari perbedaan temporer atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) kredit yang diberikan sebesar Rp581.339.573 dengan tarif pajak 22 %.

Perbedaan temporer tersebut timbul karena CKPN diakui secara komersial pada saat kewajiban timbul berdasarkan metode akrual, sedangkan secara fiskal beban tersebut baru dapat dikurangkan pada saat pembayaran atau penghapusan dilakukan.

# PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAYA ARTA

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

#### 28. LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Perusahaan tidak memiliki penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

#### 29. PIHAK TERKAIT YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

No.	Kredit Yang Diberikan	Hubungan	Plafon	Baki Debet	% terhadap Modal Inti
1.	SYARIFUDDIN	Komisaris	750.000.000	750.000.000	Back to back
2.	HO CHRISTINE	Direktur	215.000.000	169.339.269	5,39%
3.	MARDHIAN S. ROSYID	PE MR, Kepatuhan, APU PPT	49.000.000	45.700.799	1,45%
4.	HENDRI CHANDRA	Direktur Utama	60.000.000	51.199.911	1,63%
5.	HENDRI CHANDRA	Direktur Utama	750.000.000	750.000.000	Back to back
6.	ROHAYANI	PE Audit	100.000.000	60.450.842	1,92%
			<b>1.924.000.000</b>	<b>1.826.690.821</b>	<b>10,40%</b>

#### 30. KOMITMEN DAN KONTIJENSI

	2025	2024
<b>Aset Komitmen</b>		
- Fasilitas Kredit kepada nasabah belum ditarik	1.683.789.867	824.481.199
- Lain-lain	-	-
	<b>1.683.789.867</b>	<b>824.481.199</b>
<b>Aset Kontijensi</b>		
- Bunga dalam penyelesaian	9.627.102.618	7.952.545.416
- Aktiva produktif yang dihapusbukukan	6.766.267.518	7.030.550.519
- Lainnya	-	-
	<b>16.393.370.136</b>	<b>14.983.095.935</b>

BPR bisa mengoptimalkan pendapatan dalam penyelesaian untuk memperoleh laba operasional. Dimana pendapatan dalam penyelesaian BPR yang cukup besar. Selaras dengan NPL yang dimiliki BPR.

#### 31. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Pada tanggal 21 Januari 2026, Bank menerima surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-16/KO.111/2026 perihal penatausahaan penambahan modal disetor sebesar Rp930.000.000,00 yang telah dilakukan oleh pemegang saham berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah dituangkan dalam akta notaris dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berikut ini komposisi kepemilikan saham yang tercatat pada administrasi pengawasan OJK :

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Kepemilikan (%)	Jumlah
Mutia Djuwita Wijajamukti (Mutia Djuwita)	269	21,52%	2.690.000.000
Irawan Jahjadi	269	21,52%	2.690.000.000
Susilo Goetomo	712	56,96%	7.120.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>1.250</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.500.000.000</b>

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAYA ARTA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**  
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**31. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA(LANJUTAN)**

Selanjutnya, pada tanggal 6 Februari 2026, Bank menerima Surat No. S-33/KO.111/2026 persetujuan dari OJK untuk melakukan pencairan deposito escrow terkait dana setoran modal tersebut. Berdasarkan persetujuan tersebut :

1. Dana sebesar Rp930.000.000,00 yang merupakan setoran modal dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Bank.
2. Dana sebesar Rp930.000.000,00 lainnya yang merupakan dana titipan pihak ketiga wajib dikembalikan kepada pemilik dana.

**32. INFORMASI LAINNYA**

Prinsip Mengenal Nasabah

Dalam rangka penerapan prinsip mengenal nasabah dan penyesuaian terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 2023 tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal di Sektor Jasa Keuangan. Sesuai peraturan tersebut, Bank wajib menetapkan kebijakan penerimaan nasabah, kebijakan dan prosedur identifikasi nasabah, pemantauan rekening dan transaksi nasabah, mengidentifikasikan dan menerapkan manajemen risiko atas prinsip mengenal nasabah dan melaporkan kepada PPATK apabila terjadi transaksi yang mencurigakan selambatnya 3 (tiga) hari setelah diketahui oleh Bank. Bank wajib memiliki sistem informasi yang memadai untuk memungkinkan pelaksanaan secara efektif.

Direksi Bank bertanggung jawab atas penerapan dan pengawasan pelaksanaan prinsip mengenal nasabah. Perusahaan telah menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal di Sektor Jasa Keuangan, yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi sesuai dengan peraturan tersebut. Pada saat ini, manajemen Bank masih terus melakukan penyesuaian dan penyempurnaan pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah tersebut.

**33. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Perusahaan memiliki kewajiban hukum untuk memberikan imbalan pasca kerja kepada karyawan yang memenuhi syarat, yang meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.

Sesuai dengan SAK EP paragraf 28, Perusahaan seharusnya mengakui kewajiban imbalan pasca kerja tersebut sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan dan mengakui beban imbalan pasca kerja dalam laporan laba rugi. Kewajiban untuk mengakui imbalan pasca kerja telah ada sejak berlakunya standar akuntansi sebelumnya dan tetap berlaku berdasarkan SAK EP paragraf 28 yang diterapkan pada periode berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan tidak melakukan perhitungan atas kewajiban imbalan pasca kerja sehingga liabilitas imbalan pasca kerja tidak diakui dalam laporan posisi keuangan dan beban imbalan pasca kerja tidak diakui dalam laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Oleh karena tidak dilakukannya perhitungan dimaksud, jumlah liabilitas imbalan pasca kerja yang seharusnya diakui tidak dapat ditentukan.

Perusahaan telah mengikutsertakan seluruh karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun, dengan iuran yang dibayarkan Perusahaan selama tahun 2025 sebesar Rp 98.398.710. Keikutsertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan tersebut tidak menggantikan kewajiban Perusahaan untuk memberikan imbalan pasca kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAYA ARTA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**  
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**34. KELANGSUNGAN USAHA**

Laporan keuangan ini disusun dengan menggunakan asumsi kelangsungan usaha. Namun demikian, terdapat kondisi-kondisi yang menimbulkan ketidakpastian material atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, yaitu

1. Perusahaan telah mengalami kerugian usaha selama tiga tahun berturut-turut dengan rugi bersih sebesar Rp953.183.706 pada tahun 2024 dan Rp200.073.793 pada tahun 2025, sehingga akumulasi saldo rugi per 31 Desember 2025 telah mencapai Rp5.258.418.871 yang mengakibatkan ekuitas Perusahaan tergerus secara signifikan.
2. Rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) Perusahaan per 31 Desember 2025 berada pada tingkat yang melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan kredit dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet secara gabungan mencapai Rp22.412.132.749 atau sekitar 29,2% dari total kredit yang diberikan
3. Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi selama tahun 2025 hanya sebesar Rp9.191.500, yang mencerminkan kemampuan yang sangat terbatas dalam menghasilkan arus kas dari kegiatan operasional.
4. Terjadi penurunan simpanan nasabah secara signifikan sebesar Rp15.663.894.546 atau 13,2% selama tahun 2025, yang mengindikasikan tekanan likuiditas yang dihadapi Perusahaan.
5. pendapatan bunga Perusahaan mengalami penurunan sebesar Rp1.651.414.791 atau 15,5% dari Rp10.650.006.940 pada tahun 2024 menjadi Rp8.998.592.149 pada tahun 2025. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya portofolio kredit produktif akibat tingginya rasio kredit bermasalah serta penurunan penempatan pada bank lain. Pendapatan bunga bersih (*Net Interest Margin*) juga mengalami penurunan signifikan sebesar Rp425.329.971 atau 24,0% dari Rp1.774.150.520 pada tahun 2024 menjadi Rp1.348.820.549 pada tahun 2025, yang mencerminkan tekanan yang semakin besar terhadap kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari kegiatan usaha pokoknya.

Untuk mengatasi kondisi-kondisi tersebut, manajemen telah dan sedang mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. penambahan modal disetor sebesar Rp 930.000.000 yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor S-33/KO.111/2026 tanggal 6 Februari 2026, sehingga modal Perusahaan meningkat menjadi Rp 12.500.000.000.
2. melakukan upaya intensifikasi penagihan dan restrukturisasi atas kredit-kredit bermasalah secara berkelanjutan guna memulihkan portofolio kredit produktif dan meningkatkan pendapatan bunga.
3. efisiensi beban operasional yang telah menunjukkan hasil dengan menurunnya rugi bersih secara signifikan sebesar 79% dari Rp 953.183.706 pada tahun 2024 menjadi Rp 200.073.793 pada tahun 2025.
4. Pengembangan strategi penghimpunan dana pihak ketiga yang lebih agresif untuk menstabilkan basis pendanaan dan mendukung ekspansi kredit produktif guna meningkatkan pendapatan bunga Perusahaan.

Manajemen berkeyakinan bahwa langkah-langkah tersebut akan memungkinkan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Meskipun demikian, keberhasilan langkah-langkah tersebut tidak dapat dipastikan dan masih mengandung ketidakpastian yang signifikan.

Laporan keuangan ini tidak mencakup penyesuaian atas nilai terealisasi dari aset, jumlah dan klasifikasi liabilitas, serta beban yang mungkin diperlukan apabila Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usahanya."

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAYA ARTA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**  
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**35. MIGRASI PPKA KE CKPN**

Penggunaan perhitungan CKPN pada PT BPR Daya Arta disetujui oleh OJK berdasarkan surat yang dikeluarkan OJK No. SR-12/KO.11/2025 tanggal 04 Februari 2025, bahwa dengan menunjuk surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK No. S-43/D.03/2024 tanggal 24 Desember 2024 hal Penyampaian Kebijakan Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) No. 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat.

**36. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN**

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 yang diselesaikan pada tanggal 27 April 2026.